



**ANALISIS PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR
DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Lutfiah Nur Zahra

1910611282

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)

JUDUL :

**ANALISIS PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**

LUTFIAH NUR ZAHRA

1910611282

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 12 Januari 2023

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, S. H., M. Kn

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H.,M.H

NIP.198701022019031006

NIP/NIDN. 0027018603

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :


Nama : LUTFIAH NUR ZAHRA


NPM : 1910611282

Program Studi : HUKUM

Judul : ANALISIS PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR
DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI
MEDIA SOSIAL

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



Heru Suyanto, S.H.,
M.H., CLA


Dr. Slamet Tri
Wahyudi, S.H., M.H


Rosalia Dika A, S.H.,
M.H


Dr. H. Abdul Halim,
M.Ag




Taupiqurrahman, S.
H., M. Kn

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Januari 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISILITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : LUTFIAH NUR ZAHRA

N.I.M. : 1910611282

Tanggal : 19 Januari 2023

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : LUTFIAH NUR ZAHRA

NIM/NPM : 1910611282

Fakultas : Hukum

Program Studi : SI Hukum

Jenis Karya : Skripsi/Memorandum Hukum*)

Judul : ANALISIS PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR
DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI
MEDIA SOSIAL

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN
Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 19 Januari 2023

Yang menyatakan,



LUTFIAH NUR ZAHRA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan judul “ANALISIS PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL” skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini terdapat hambatan, namun banyak pihak yang kerap membantu menyelesaikan skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dari penulis kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA., Comm selaku rektor UPN Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
3. Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn., selaku Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Ibu Ir. Yuliana Yuli W, MM., MH selaku Pembimbing Akademik penulis yang membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
5. Bapak, Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H.,M.H., selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Bapak Ali Imran Nasution, S.H.,M.H selaku pakar hukum tata negara yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu membimbing dan berdiskusi terkait dengan Hukum Tata Negara yang bersangkutan dengan penelitian ini;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
8. Orang Tua dan Keluarga, yang telah memberikan bantuan secara finansial dan emosional dalam menyelesaikan penulisan ini;
9. Kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung, mendoakan serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum maupun secara khusus kepada mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

Jakarta, 12 Januari 2023

LUTFIAH NUR ZAHRA

ABSTRAK

Anggota DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, anggota DPR mempunyai hak imunitas untuk bebas dalam berpendapat untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, anggota DPR tidak dapat digugat secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemajuan sebuah teknologi membuat perkembangan di dalam parlemen menjadi semakin luas. Dalam kasus yang menjerat Arteria Dahlan dalam rapat kerja bersama dengan Jaksa Agung menjadikan gambaran adanya kekosongan dalam batasan hak imunitas dan juga regulasi media sosial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undang dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa Arteria Dahlan tidak dapat dipidana dalam tindak pidana ujaran kebencian dikarenakan adanya hak imunitas yang melekat, sehingga diperlukannya kebijakan baru terkait batasan hak imunitas dan penambahan klausul terkait media sosial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Hal tersebut bertujuan patennya batasan hak imunitas yang mengikat anggota DPR dan media sosial.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Hak Imunitas Anggota DPR, Media Sosial

ABSTRACT

Members of the DPR are representatives of the people who are elected by the people, members of the DPR have the right of immunity to be free in expressing opinions in carrying out their duties and authorities, and members of the DPR cannot be sued criminally or civilly for carrying out their duties and authorities. Advances in technology make developments in parliament more extensive. In the case that ensnared Arteria Dahlan in a joint working meeting with the Attorney General, it illustrates that there is a vacuum in the limits of immunity rights and also social media regulations in Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, and the Regional Representative Council. This study uses normative research, with a statutory and conceptual approach. This research found that Arteria Dahlan could not be convicted of hate speech crimes due to the inherent right of immunity, so a new policy was needed regarding the limitation of immunity rights and the addition of clauses related to social media in Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the Representative Council People, and the Regional Representative Council. This is intended to patent limits on immunity rights that bind members of the DPR and social media.

Keywords: Hate Speech, Immunity Rights of DPR Members, Social Media

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	10
B. Tinjauan Teori	13
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	22
BAB IV PEMBAHASAN	36
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	55